

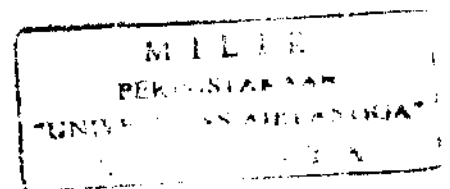
**ANALISIS PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DI KOTAMADYA SURABAYA
SELAMA PELITA V
TAHUN 1989 / 1990 - 1993 / 1994**

S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN**



KK
c. 637 / 97
Ars
a



DIAJUKAN OLEH :

YENI ARSIYANTI

No. Pokok. : 049213884

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

SKRIPSI

ANALISIS PERBANDINGAN
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
DI KOTAMADYA SURABAYA SELAMA PELITA V
TAHUN 1989/1990 - 1993/1994

DIAJUKAN OLEH :

YENI ARSIYANTI

No. Pokok : 049213884

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

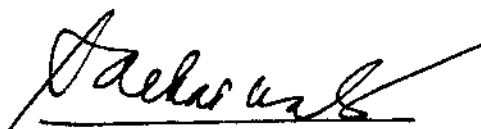
DOSEN PEMBIMBING,



Drs. EC. R. DJOHAR DJAELANI

TANGGAL, 9-6-1997

KETUA JURUSAN,



Drs. EC. SOEKARNOTO

TANGGAL, 9-6-1997

ABSTRAKSI

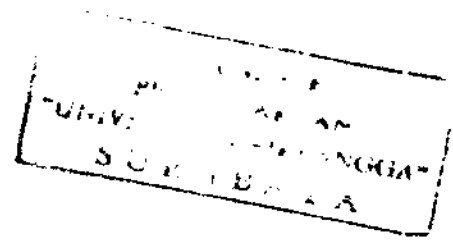
Menurunnya harga minyak bumi di pasaran dunia menyebabkan penerimaan negara juga menurun, sehingga kemampuan pemerintah di dalam membiayai pembangunan juga menjadi berkurang. Agar dapat terus melaksanakan pembangunan nasional maka pemerintah harus mencari sumber alternatif baru untuk dapat meningkatkan penerimaannya. Pajak merupakan alternatif terbaik.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak pusat yang sangat potensial untuk menunjang penerimaan negara. Dengan sistem pajak yang self assesment pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak di dalam pembayarannya agar tidak timbul keinginan untuk tidak membayar. Kemudahan itu diantaranya yaitu pembayaran dilakukan pada tempat di mana wajib pajak berkedudukan sehingga tidak menyulitkan. Misalnya masalah transportasi karena jauhnya tempat pembayaran pajak dari tempat tinggal.

Di Surabaya terbagi menjadi empat wilayah Kantor Pelayanan Pajak yaitu Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya Utara. Tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak membawahi beberapa kecamatan. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Barat membawahi 5 Kecamatan. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Timur membawahi 9 kecamatan. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Selatan membawahi 9 kecamatan. Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Utara membawahi 4 kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan realisasi penerimaan pajak penghasilan di masing-masing kantor pelayanan secara kebetulan atau benar-benar bermakna. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis varians di mana keempat kantor pelayanan pajak di atas merupakan variabel bebas.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan yang bermakna antara realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Utara dengan probabilitas kesalahan kurang dari 5%. Penyebab terjadinya perbedaan tersebut diantaranya adalah jumlah wajib pajak, jenis penerimaan pajak penghasilan dan restitusi pajak penghasilan.

BAB I
PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pemerintah merupakan perwujudan dari legitimasi kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh konstitusi.

Pemerintah dalam hal ini, hendaknya mewujudkan kesejahteraan baik jasmani maupun rohani bagi warga negaranya yang mencakup kepentingan perseorangan, golongan, sesama warga negara dan antara warga negara dan pemerintah, sedangkan untuk

"Terciptanya kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti adanya keinginan terciptanya suatu pemerintahan yang mana pemerintahannya mampu menyusun dan membangun suatu masyarakat yang sejahtera baik material maupun spiritual".¹

Seperti halnya pemerintah Indonesia yang mempunyai tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia

¹ R. Djamal Hoesen Koesoemaadmadja, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Eresco, Bandung, 1984, halaman 9.